

TINJAUAN BUKU

BANSOS: ANTARA FORMALITAS, KEADILAN, DAN PEMBERI HARAPAN PALSU?

BANSOS: BETWEEN FORMALITY, EQUALITY, AND FALSE HOPES?

Judul Buku: Dilema Bansos: Pembelajaran dari Pandemi dan Urgensi Reformasi Tata Kelola
Penulis: Yanu Endar Prasetyo, Rinto Andhi Suncoko, Ria Yulianti, Hamong Santono, Dini Andriani, Maria Anik, dan Dwi Premadha Lestari (2023). Penerbit: Buku Kompas, Jakarta, xxviii + 156 halaman; ISBN: 978-623-160-101-8

Dina Srirahayu

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Email: dina.andriyanto@gmail.com

PENDAHULUAN

Bantuan sosial atau yang lebih dikenal dengan singkatan bansos, merupakan salah satu program perlindungan sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia. Berbicara mengenai bansos akan selalu menjadi pembahasan yang menarik. Dalam pemilu tahun 2024 yang telah berlangsung pada awal tahun 2024 ini, bansos juga menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan (Singgih, 2024). Bahkan bansos masuk ke dalam salah satu poin yang disebut dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) tahun 2024. Terdapat dua permohonan yaitu Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD (MKRI, 2024a). Kedua gugatan tersebut memohon adanya penyelidikan mengenai penyalahgunaan anggaran negara atau bantuan sosial (bansos) yang disalahgunakan untuk menaikkan suara kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 (MKRI, 2024b).

Di luar ramainya pembahasan topik bansos terkait dengan pemilu tahun 2024, sejak kemunculan bansos itu sendiri telah menuai banyak kritik dan permasalahan. Sayangnya beberapa permasalahan tersebut juga muncul secara berulang setiap tahunnya seakan tidak ada perbaikan dari sistem bansos yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa permasalahan tersebut, terutama yang paling banyak disorot dan di kritik oleh banyak pihak adalah terkait dengan mekanisme penyaluran bansos, tidak tepatnya sasaran penerima bansos, dan korupsi dana bansos. Jadi alih-alih bansos dijadikan sebagai item untuk membantu meringankan kondisi rakyat, justru malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi sebagian pihak. Buku Dilema Bansos: Pembelajaran dari Pandemi dan Urgensi Reformasi Tata Kelola ini telah mengupas dengan sangat baik dan lengkap permasalahan-permasalahan yang ada dalam bansos. Harapannya dari penulisan buku tersebut nantinya dapat digunakan untuk perbaikan dalam perencanaan, pengelolaan, maupun evaluasi penyelenggaraan bansos oleh pihak-pihak terkait agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Sebelum memaparkan beberapa kelebihan dan keterbatasan dari buku Dilema Bansos ini, penulis akan memberikan gambaran singkat dari masing-masing bab yang ada dalam buku tersebut.

SELAYANG PANDANG BUKU DILEMA BANSOS

Buku Dilema Bansos: Pembelajaran dari Pandemi dan Urgensi Reformasi Tata Kelola terdiri atas 6 bab yang disusun tanpa membaginya ke dalam bentuk bab melainkan langsung di susun berdasarkan judul-judul. Susunan judul-judul tersebut antara lain adalah:

Tabel 1. Daftar Judul dalam Buku Dilema Bansos

Judul Bab	Halaman	Jumlah Halaman
Pandemi dan Kelompok Rentan	1-18	18
Bansos di Era Pandemi	19-50	32
Permasalahan Bansos di Indonesia	51-72	22
Implementasi Bansos untuk Kelompok Rentan	73-100	28
Peran Organisasi Masyarakat Sipil	101-106	6
Refleksi	107-112	6

Sumber: Prasetyo, et al., 2023.

Pandemi dan Kelompok Rentan. Bab awal dalam buku ini menguraikan tentang pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia pada awal tahun 2020. Secara khusus dampak dari pandemi tersebut (yang dibatasi dalam kurun waktu 2020-2022) terutama bagi kelompok rentan telah menjadi perhatian para tim penulis buku. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan banyak dampak tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dampak ekonomi, sosial, spiritual, dan juga mental. Dalam buku ini disebutkan bahwa COVID-19 telah memberikan dampak tidak hanya bersifat multidimensi, tetapi juga berdampak secara sistemik dan berjenjang (UNDRR & UNU EHS, 2022 dalam Prasetyo, et al., 2023.) di berbagai lapisan masyarakat, khususnya di lapisan ekonomi bawah. Dalam bab ini tim penulis buku menyajikan banyak data dan contoh dari hasil penelitian terdahulu tentang berbagai dampak dari pandemi COVID-19. Dalam kondisi ini kehadiran negara menjadi sangat penting dalam membantu dan melindungi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dan terdampak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945.

Sebagai bab pembuka, dalam bab awal ini tim penulis buku juga menjelaskan paradigma dan tipologi bansos untuk memberikan pemahaman, wawasan, dan pengantar bagi para pembaca

agar lebih mudah untuk memahami pembahasan di bab-bab selanjutnya. Di Indonesia sendiri, program bansos yang telah berlangsung ada yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan (*pro poor*), ada program bansos yang bertujuan untuk mendorong program pemberdayaan dan investasi sosial, namun ada juga program yang lebih kompleks yang menasar kedua tujuan tersebut sekaligus (Prasetyo, et al., 2023). Menurut tim penulis buku, pengelompokkan jenis dan tipe bansos ini dapat menggambarkan cara pandang dan bentuk empati negara (Pemerintah) terhadap warga negaranya. Menurut Prasetyo, et al. (2023), selama warga negara hanya dipandang sebagai komoditas politik, maka selama itu pula tata kelola bansos akan jauh dari tepat sasaran.

Bansos di Era Pandemi. Bab dua buku ini telah menyajikan dengan sangat lengkap dan jelas berbagai jenis bantuan sosial selama pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Selama pandemi COVID-19, bansos tersebut disalurkan melalui K/L dalam payung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mulai digulirkan sejak Maret 2020 sampai 2022. Setidaknya dalam buku ini, telah dipaparkan sebanyak 23 jenis program bansos dari berbagai K/L yang ditujukan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 bagi masyarakat miskin, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Deskripsi masing-masing program bansos tersebut telah memperlihatkan betapa program bansos yang ada di Indonesia sangat beragam. Tidak hanya dari segi nama program, lembaga pelaksana program dan tujuan program sesuai dengan kepentingan dari masing-masing K/L pelaksana, tetapi juga dari penjelasan tujuan program, kita dapat melihat bahwa sebenarnya program bansos tersebut tumpang tindih, termasuk kriteria penerima manfaat program.

Prasetyo, et al. (2023) menyebutkan bahwa permasalahan tersebut dapat berakar dari belum tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terbaru dan terintegrasi dengan baik yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi semua K/L untuk menentukan penerima manfaat program bansos. Keduapuluh tiga program bansos tersebut akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jenis Bansos dan K/L Pelaksana di Indonesia selama Pandemi COVID-19

No.	Program Bansos	K/L Pelaksana	No.	Program Bansos	K/L Pelaksana
1.	Program Keluarga Harapan (PKH)	Kemensos	13.	Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan	Kemensos
2.	Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Kemensos	14.	Bantuan Subsidi Upah/BLT Subsidi Gaji	Kemenaker
3.	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	Kemendes PDTT	15.	BLT Minyak Goreng	Kemensos
4.	Bansos Tunai Non-Jabodetabek/Bansos Tunai Presiden	-	16.	Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKWLN)	Kemenko Bidang Perekonomian
5.	Bansos Sembako Jabodetabek	Kemensos	17.	Insentif Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Kementerian PUPR
6.	Diskon/Pembebasan Biaya Listrik	Kementerian ESDM	18.	BLT UMKM	Kemenkop UKM
7.	Kartu Prakerja	Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja	19.	Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)	Kemenkop UKM
8.	KIP Sekolah	Kemendikbudristek	20.	Pembebasan PPH Final 0,5% untuk Pelaku UMKM	Kemenkeu
9.	KIP Kuliah	Kemendikbudristek	21.	Subsidi Bunga/Margin untuk Kredit UMKM	Kemenkeu
10.	Bantuan Kuota Internet Pelajar dan Guru	Kemendikbudristek	22.	Pembebasan Pembayaran Bunga dan Pokok KUR	Kemenkeu
11.	Bantuan Subsidi Upah Guru Honorer	Kemendikbudristek	23.	BLT BBM	Kemensos
12.	Bantuan Apresiasi Pelaku Budaya (APB)	Kemendikbudristek			

Sumber: Prasetyo, et al., 2023.

Permasalahan Bansos di Indonesia. Melalui bab ini, pembaca dapat dengan lengkap mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan penyebaran bansos di Indonesia yang dilakukan masih menemui banyak masalah. Menurut hasil analisis tim penulis buku, setidaknya terdapat tiga permasalahan utama dan mendasar yang menjadi penghambat pelaksanaan bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Tiga permasalahan tersebut adalah masalah ketersediaan dan akurasi data, masalah regulasi dan tata kelola, serta masalah teknis dan non teknis lainnya. Tiga tambahan lainnya adalah masalah terkait mekanisme aduan atau komplain bansos, perspektif gender dalam kebijakan bansos, dan bentuk pilihan penyaluran bansos antara transfer tunai atau transfer barang. Bab ini memperlihatkan bahwa sebenarnya masalah-masalah yang ada yang terkait dengan penyaluran bansos bukanlah masalah yang baru muncul.

Melainkan masalah yang sama yang selama ini sudah ada tetapi tidak pernah terselesaikan. Permasalahan-permasalahan seperti data yang tidak akurat dan tumpang tindih, penerima bantuan dobel, pungutan liar, korupsi dana bantuan sosial, nepotisme, bantuan yang tidak layak, menunjukkan bahwa kerjasama antara pusat dan daerah masih sangat kurang. Terutama dalam hal penyediaan data yang valid serta tidak adanya pengawasan dalam penyelenggaraan dan penyaluran program serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penerima manfaat.

Implementasi Bansos untuk Kelompok Rentan. Bab ini menyoroti tentang pembagian atau implementasi bansos kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin dan rentan yang ada di Indonesia. Tim penulis buku mengelompokkan implementasi bansos ke dalam 11 kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang seharusnya menerima manfaat

bansos tersebut antara lain adalah: 1) rumah tangga miskin; 2) perempuan dan anak; 3) lanjut usia (lansia); 4) penyandang disabilitas; 5) pengungsi baik karena bencana alam (dalam negeri) maupun pengungsi akibat bencana kemanusiaan (umumnya berasal dari negara lain); 6) pengangguran dan kelompok prekariat lainnya; 7) masyarakat adat; 8) orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan pasien TB; 9) pekerja migran Indonesia (PMI); 10) pekerja rumah tangga (PRT); 11) petani dan nelayan kecil. Sayangnya dari kesebelas kelompok masyarakat yang seharusnya menerima manfaat bansos tersebut, belum semuanya mendapatkan dan menerima bantuan. Selama ini bantuan masih banyak difokuskan kepada individu atau rumah tangga miskin dan mengabaikan kelompok masyarakat rentan lainnya.

Peran Organisasi Masyarakat Sipil. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran yang cukup penting dalam upaya menyukseskan pelaksanaan program bansos. Banyak OMS/LSM yang telah memiliki jaringan yang kuat di masyarakat atau komunitas lokal dan telah membangun institusi serta struktur untuk pelayanan masyarakat (Prasetyo, et al., 2023). Sehingga Pemerintah dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencapai target pembangunan manusia, penurunan tingkat kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan bekerja sama dan menggandeng organisasi-organisasi tersebut diharapkan dapat memperluas dan meningkatkan efektivitas bansos untuk memperkuat infrastruktur layanan yang dibangun oleh pemerintah. Disini dijelaskan bahwa OMS/LSM tersebut setidaknya memiliki tiga peran, terutama di masa pandemi, yaitu peran edukasi, peran pendampingan atau layanan sosial, dan peran advokasi. Beberapa contoh OMS yang telah bekerjasama dengan pemerintah (Kemensos) antara lain adalah BAZNAS, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), KPI, KAPAL Perempuan, Aisyiah dan lain sebagainya yang tergabung dalam Mitra MAMPU, turut aktif melakukan pemantauan bantuan sosial yang diberikan kepada warga terdampak COVID-19.

Refleksi. Bab terakhir dari buku ini memilih menggunakan terminologi refleksi untuk merangkum isi dari buku. Pada bab ini Prasetyo, et al. (2023) menekankan kembali segala bentuk permasalahan yang ada dalam bansos. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah: 1) penyaluran bansos kepada rumah tangga miskin dan kelompok rentan selama ini sering kali tidak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara; 2) ragam bansos yang ada di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 sudah cukup beragam (23 jenis), sayangnya ragam tersebut masih terfragmentasi di banyak K/L yang berbeda sesuai dengan kepentingan masing-masing K/L terkait; 3) dari 11 kelompok rentan yang berhak menerima bansos, selama ini bansos paling banyak masih menysasar rumah tangga miskin dan kelompok pekerja (formal dan UMKM), sedangkan kelompok lainnya seperti ODHA, penderita TB/TBC, PRT, masyarakat adat, pekerja migran, disabilitas masih menjadi kelompok rentan yang minim akses terhadap bansos; 4) regulasi bansos masih belum memperhatikan aspek pengarusutamaan gender di dalam kebijakannya. Kemudian bab ini juga memberikan saran dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan oleh Pemerintah agar penyaluran bansos semakin lebih baik dan meminimalkan pengulangan kesalahan yang sama. Poin utama yang ditekankan oleh Prasetyo, et al. (2023) adalah perlunya data yang jelas sebagai acuan untuk menentukan penerima bansos. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam penyusunan data tersebut.

KELEBIHAN BUKU

Pemilihan topik tentang Program Bansos dan menjadikannya sebagai sebuah buku, merupakan keputusan yang tepat yang diambil oleh tim penulis buku. Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan program bansos tersebut. Justru bansos menjadi salah satu program bantuan yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak masyarakat (Rukmorini, 2023). Pembahasan tentang bansos ini menjadi semakin tepat karena lebih dari sewindu program ini dijalankan di Indonesia, namun program tersebut dari tahun ke tahun masih selalu menghadapi masalah yang sama.

Bagi masyarakat awam, buku ini mengupas dengan sangat lengkap jenis-jenis bansos yang ada di Indonesia, khususnya pada saat pandemi COVID-19 yang dibatasi pada rentang waktu 2020-2022. Dijelaskan sekitar 23 program bansos yang digulirkan oleh Pemerintah dan K/L terkait. Beberapa jenis bansos tersebut akan tetap ada dan diberikan kepada masyarakat di luar masa pandemi. Pada tahun 2024, khususnya pasca pemilu, beberapa bansos masih akan tetap diberikan kepada masyarakat seperti PKH, BLT Mitigasi Risiko Pangan, program bansos beras 10 kg, program bantuan pangan non tunai (BPNT), dan program Indonesia Pintar (PIP) (Portal Informasi Indonesia, 2024). Agar tidak mengulang kesalahan yang sama, para pemangku kebijakan program bansos sangat disarankan untuk membaca buku ini.

Selain itu, buku ini juga memberikan penekanan pada masyarakat rentan yang paling minim akses terhadap bansos seperti ODHA, penderita TB/TBC, PRT, pekerja migran, masyarakat adat, penyandang disabilitas yang tidak hanya terbatas pada penyandang disabilitas tingkat berat saja, lansia, serta ketidakadilan gender dalam bansos seperti isu marginalisasi, subordinasi, stigma negatif/stereotip, dan kekerasan (Chotim dan Jannah, 2020 dalam Prasetyo, et al., 2023). Dengan adanya penekanan dan pembahasan pada kelompok rentan tersebut diharapkan program bansos ke depannya dapat lebih adil dan merata, menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan dengan program yang tepat.

Tidak hanya memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi bansos di Indonesia berikut dengan segala macam kesulitan dan permasalahan yang menyertainya, buku ini juga memberikan saran untuk mengurangi permasalahan terkait bansos. Beberapa saran yang diberikan oleh buku ini antara lain adalah: 1) adanya agenda dan arah yang lebih baik untuk bansos serta menjadi program prioritas Pembangunan. Sehingga perlu adanya peta jalan yang komprehensif termasuk kapan bansos akan diberikan dan akan dihentikan; 2) Pemerintah harus memastikan proyek Satu Data Indonesia (SDI) dapat dipercepat dan menjadi basis dalam penentuan kebijakan bansos termasuk di

dalamnya pertukaran dan pembaruan DTKS.

Untuk mewujudkan SDI, maka diperlukan koordinasi, kerja sama, dan integrasi data antara berbagai K/L terkait, pusat dan daerah, serta regulasi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih produksi data; 3) Sosialisasi terhadap program bansos perlu ditingkatkan, mengurangi pergantian nama program yang terlalu sering agar masyarakat tidak bingung, dan penyederhanaan syarat serta prosedur bansos agar lebih inklusif dengan menggunakan pendekatan *targeting*; 4) perlunya inisiatif dalam evaluasi program bansos dan monitoring bansos, tidak hanya dilakukan oleh K/L pelaksana tetapi juga melibatkan OMS, serta memperkuat peran aparat penegak hukum dalam pencegahan korupsi dan penegakan hukum yang tegas. Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat terus melaksanakan mandat konstitusi yaitu untuk melindungi segenap warga negara, melalui program perlindungan sosial baik dalam bentuk bantuan sosial maupun jaminan sosial dengan pendekatan yang bersifat universal dan tanpa syarat (*universal social protection*) serta penyelenggaraan bansos yang tepat sasaran, tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat waktu.

KETERBATASAN BUKU

Secara keseluruhan penjelasan mengenai jenis bansos, permasalahan yang menyertainya, serta saran-saran yang diusulkan sudah sangat jelas dan lengkap. Namun demikian, masih terdapat sedikit kekurangan dalam penyusunan buku ini tetapi tidak mengurangi nilai substansi. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain adalah:

- 1) Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai metode penelitian riset cepat (*rapid study*) yang dilakukan oleh tim penelitian dan alasan memilih metode tersebut. Metode riset cepat memang memiliki kelebihan dapat menjawab isu yang sedang berlangsung dengan cepat (tanpa kehilangan momentum) dan juga mendorong hadirnya kebijakan berbasis bukti guna merespon pesatnya perubahan situasi akibat dampak pandemi (KSI, 2020). Namun harus juga diperhatikan tentang kualitas, reliabilitas, dan akurasi data. Tim peneliti harus dapat menjamin

- kelengkapan data yang dikumpulkan agar kebijakan yang disusun menjadi efektif.
- 2) Penelitian yang dilakukan dibatasi hanya pada masa pandemi COVID-19, yaitu pada rentang waktu tahun 2020-2022. Mungkin dapat dilakukan studi atau penelitian lanjutan tentang pelaksanaan bansos sebelum dan sesudah pandemi agar dapat membandingkan apakah program yang diberikan sama atau program mana saja yang harus tetap dipertahankan dan apakah kebijakan terkait bansos yang dihasilkan akan dapat diterapkan pada semua situasi (di luar pandemi).
 - 3) Informan yang dipilih kurang merata, daftar narasumber atau informan yang terdapat dalam *list* mayoritas adalah perwakilan dari wilayah Indonesia Tengah dan Timur, untuk perwakilan Indonesia Barat hanya ada beberapa yaitu Yayasan Flowers Aceh, Dinas Sosial Sumatera Utara, Dinas Sosial dan Direktur SD Inpres Jember.
 - 4) Sudut pandang penerimaan dana bansos oleh keluarga penerima manfaat mayoritas bersumber dari studi literatur dan penelitian terdahulu, serta FGD dengan beberapa yayasan atau OMS seperti Yayasan Flowers Aceh, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Nusa Tenggara Barat, LIBU Perempuan Sulawesi Tengah, JARAK Indonesia, Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani. Belum ada data informan yang berasal dari pendamping program bansos untuk KPM dan masyarakat sekitar yang tidak menerima bansos. Penambahan informan ini diperlukan agar informasi dan data yang diperoleh lebih lengkap dan beragam.
 - 5) Begitu juga dengan dampak dari pandemi COVID-19, data yang disampaikan mayoritas adalah dari studi literatur dan penelitian terdahulu, serta penyampaian dalam teks buku tanpa menyebutkan kasus terjadi di daerah mana. Sehingga memberikan kesan memukul rata atau menggeneralisasi dampak COVID-19 di semua daerah adalah sama.
 - 6) Terdapat beberapa kesalahan teknis seperti penyajian data berupa gambar dan grafik dalam buku tidak jelas, masih terdapat beberapa kesalahan penulisan kata, serta data disabilitas yang digunakan terlalu lama yaitu dari ILO tahun 2012 (hal 81).
- Selain studi tentang bansos yang dilakukan oleh Prasetyo, et al. (2023), penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Sabarisman pada tahun 2020 dan juga Susantyo, et al. (2020). Sabarisman (2020) meneliti tentang ketepatan sasaran dan nilai kemanfaatan bantuan sosial sembako di Jabodetabek. Sedangkan Susantyo, et al. (2020) melakukan penelitian survei tentang bantuan sosial tunai Kementerian Sosial bagi keluarga terdampak COVID-19. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, et al. (2023), Sabarisman (2020), dan Susantyo, et al. (2020) sama-sama merupakan penelitian yang dilakukan dalam rangka mengejar momentum pandemi COVID-19.
- Sebagai sebuah penelitian survei dan penelitian momentum, Susantyo, et al. (2020) dengan sangat jelas menjelaskan tahapan dalam melakukan penelitian, pemilihan lokasi dan sampel penelitian. Penggambaran tentang teknik pemilihan lokasi dan sampel penelitian menjadi sangat menarik karena penelitian dilakukan pada masa pandemi COVID-19 di mana setiap orang harus melakukan jaga jarak (*social distancing*). Hal ini menjadi sebuah tantangan dan hambatan tersendiri karena adanya beberapa aturan baik secara nasional maupun daerah yang membatasi gerak dan mobilitas penelitian. Selain itu, sebagai sebuah penelitian survei yang dilakukan dalam skala nasional, penjelasan teknik pemilihan lokasi dan sampel penelitian memberikan gambaran kepada pembaca dan upaya dari peneliti untuk menjamin keterwakilan, keakuratan, dan kelengkapan data. Penjelasan yang dilakukan oleh Susantyo, et al. (2020) dapat menjadi contoh baik tentang penjabaran metode penelitian, pemilihan informan atau sampel, dan penjelasan dampak COVID-19 yang terjadi di daerah tertentu yang menjadi kelemahan dalam buku Prasetyo, et al. (2023) (poin 1, 3, 5).

Berkaitan dengan kajian bansos sebelum masa pandemi COVID-19, Rahayu (2012) telah melakukan kajian terhadap beberapa program bansos seperti BOS, Jamkesmas, PNPB Mandiri, dan PKH. Berdasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Rahayu (2012) dan Prasetyo, et al. (2023) terdapat kesamaan bahwa permasalahan pada bansos sejak awal program dikeluarkan adalah permasalahan terkait ketidaktepatan sasaran/tujuan, tidak tepat guna, jumlah, waktu, dan pelaporan (Rahayu, 2012; Prasetyo, et al., 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan bansos di Indonesia dari jaman dulu hingga saat ini masih belum banyak berubah dan belum banyak perbaikan. Kesalahan dan permasalahan yang sama masih terus berulang dari waktu ke waktu. Sayangnya penulis belum menemukan kajian tentang bansos setelah masa pandemi yang paling terbaru untuk membandingkan dengan buku Prasetyo, et al. (2023) (keterbatasan poin 2).

Sementara itu terkait dengan keragaman responden dan informan (poin 4), penelitian yang dilakukan oleh Winarno, et al. (2020) cukup memberikan sudut pandang yang berbeda. Winarno, et al. (2020) melihat persepsi masyarakat tentang kebijakan pengurangan risiko dampak COVID-19 bagi penerima manfaat bantuan sosial. Responden dalam penelitian Winarno, et al. (2020) tersebut mencakup masyarakat secara umum yang tidak menerima bansos dan keluarga penerima bansos (KPM) itu sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winarno, et al. (2020) menunjukkan bahwa mayoritas KPM mengharapkan program bansos terus berlanjut, dan dari masyarakat umum sendiri mengharapkan agar jangkauan bansos lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan dari KPM terhadap bansos. Padahal seharusnya bansos hanya dijadikan sebagai stimulus dan masyarakat tidak boleh bergantung (Dewi, 2020). Sementara masyarakat yang tidak mendapatkan bansos juga menjadi ingin mendapatkan bansos tersebut karena dilihat cukup membantu dan menguntungkan.

Menurut penulis, temuan dari hasil penelitian Winarno, et al. (2020) menjadi landasan pentingnya keberagaman jenis informan terutama dari masyarakat umum yang tidak menerima

bansos dan khususnya dari pendamping program. Pendapat dari mereka diperlukan untuk melihat dan mengetahui apakah program bansos sudah tepat sasaran dan sudah sesuai pelaksanaannya. Penjelasan informasi dari sudut pandang masyarakat umum, terutama dari pendamping program belum ditemukan dalam buku Prasetyo, et al. (2023) maupun Winarno, et al. (2020). Karena dalam bukunya sendiri, Winarno, et al. (2020) menyebutkan keterbatasan penelitiannya dalam teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu teknik *sampling* insidental. *Sampling* insidental dianggap kurang mampu menjamin keterwakilan populasi dan kurang memadai bagi upaya generalisasi hasil penelitian (Winarno, et al., 2020).

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19

Banyak ragam dan bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat pada masa pandemi COVID-19 seperti yang telah dijabarkan dalam buku Dilema Bansos Pembelajaran dari Pandemi dan Urgensi Reformasi Tata Kelola. Namun, berdasarkan hasil penelitian dari SMERU *Research Institute*, terdapat empat program besar bansos yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), BLT Dana Desa (BLT DD), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dapat menggambarkan kecukupan nilai program bantuan karena empat program tersebut mencakup setidaknya 35 juta atau 50 persen rumah tangga (SMERU *Research Institute*, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua jenis program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dapat diakses oleh masyarakat dan terdistribusi dengan maksimal.

Selain permasalahan data yang tidak akurat dan mutakhir, khususnya DTKS, salah satu penyebab lainnya adalah kurangnya sosialisasi tentang program bantuan sosial pemerintah yang banyak jenisnya tersebut. Sehingga banyak masyarakat (khususnya masyarakat miskin yang memiliki akses informasi terbatas) tidak dapat memanfaatkan program-program tersebut.

Bahkan di beberapa daerah di mana program bansos terbatas, masyarakat secara swadaya, saling bergotong-royong dan tolong menolong di antara anggota masyarakat untuk saling meringankan beban, misalnya seperti program “cantelan” bahan pangan. Program “cantelan” bahan pangan adalah berbagi bahan makanan, dapat berupa sayuran, lauk-pauk, mi instan, atau beras yang di taruh di kantong plastik dan di gantung di pagar-pagar rumah, di pos satpam, di pos siskamling, atau di tembok-tembok sepanjang jalan. Hal ini merupakan kearifan lokal masyarakat untuk berbagi sebagai strategi bertahan hidup di masa pandemi COVID-19 (Prokompim, 2020).

Mengurai permasalahan terkait penyaluran dana bansos, bagaikan mengurai benang yang kusut. Masih terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan dan pesimisnya akan membutuhkan waktu yang lama. Padahal jika mau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan berulang, jadi bukanlah hal yang baru dihadapi. Dewi (2020) dalam bukunya menyebutkan bahwa kebutuhan utama bansos di Indonesia setidaknya dalam lima tahun kedepan adalah perbaikan data penerima bansos. Menurut Dewi (2020) data yang baik dan efektif, dua puluh kali lipat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga perlunya penyusunan kriteria keluarga penerima manfaat (KPM) yang jelas. Data yang baik dan kriteria KPM yang jelas menjadi daya dorong bagi efektivitas program bansos agar sesuai tujuan akhir program.

Buku Dilema Bansos telah mengupas semua permasalahan tersebut dengan sangat lengkap. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa semua permasalahan yang sama dalam program bansos tersebut masih tetap berlanjut dan belum terselesaikan hingga saat ini. Jawaban yang mungkin dapat diberikan oleh penulis adalah terkait mentalitas dan komitmen dari para pelakunya. Baik dari sisi pemerintah pusat, kementerian dan lembaga terkait sebagai pembuat kebijakan, pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pusat, pemerintah desa sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, bahkan dari masyarakat itu sendiri sebagai subjek penerima program. Pemerintah

pusat, K/L, pemerintah daerah dan pemerintah desa diharapkan memiliki sikap tanggung jawab dan amanah atas setiap tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki. Dengan demikian ego sektoral dan koordinasi juga akan lebih mudah dilakukan dan program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Begitu pula dengan masyarakat (khususnya masyarakat yang tidak berhak menerima bansos) harus memiliki kesadaran diri yang tinggi agar tidak serakah dan mengambil hak orang lain. Dengan adanya komitmen ini diharapkan permasalahan-permasalahan bansos yang sebenarnya lebih banyak ke permasalahan teknis dapat segera terselesaikan dengan cepat dan cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

SIMPULAN

Permasalahan-permasalahan dalam program bansos yang ada selama ini merupakan permasalahan yang berulang, sejak awal program bansos dikeluarkan hingga saat ini. Permasalahan seperti penerima bansos yang tidak sesuai/tidak tepat sasaran, DTKS yang tidak akurat dan mutakhir, korupsi bansos, ragam bansos yang banyak dan terfragmentasi di banyak K/L, dan berbagai permasalahan lainnya bukanlah hal yang mustahil dan sulit untuk dilakukan penyelesaian layaknya mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Buku Dilema Bansos telah sangat lengkap dan jelas mengupas berbagai jenis permasalahan tersebut. Buku ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi para pemangku kebijakan yang terlibat dalam program bansos. Salah satu tugas utama yang mendesak untuk dilakukan adalah perlunya perbaikan dan penyediaan data penerima bansos akurat dan mutakhir serta kriteria KPM yang jelas. Sedangkan kita sebagai masyarakat pada umumnya, dapat berperan aktif dalam mengawal bansos dengan turut serta mengawasi kegiatan tersebut agar terlaksana sesuai dengan tujuannya, tepat sasaran, tepat guna, tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat waktu. Tidak hanya sebagai formalitas kegiatan dari sebuah kementerian atau lembaga tertentu, tidak ditumpangi oleh kepentingan oknum dan elit

politik tertentu, dan bukan sebagai lahan korupsi oleh beberapa pihak. Bansos diharapkan dapat secara adil didistribusikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan dan bukan hanya sebagai harapan palsu bagi mereka yang sudah sangat menantikan bantuan tersebut.

PUSTAKA ACUAN

- Dewi, D. N. A. M. (2020). Mengupas kebijakan populis dalam program bantuan sosial di Indonesia. Dalam Yustika, A. E. (Eds.), *Menjemput musim semi transformasi dan reformasi ekonomi 2019-2024*. Malang: Intrans Publishing.
- Gitiyarko, V. (2021). PSBB hingga PPKM kebijakan pemerintah menekan laju penularan COVID-19. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/psbb-hingga-ppkm-kebijakan-pemerintah-menekan-laju-penularan-covid-19>.
- Mahkamah Konstitusi RI (MKRI). (2024a). *Risalah sidang perkara nomor 1/PHPU. PRES-XXII/2024 perihal perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024*. https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/9715_Risalah-pdf_1.PHPU.PRES-XXII.2024%20tgl.%2027%20Maret%202024.pdf.
- Mahkamah Konstitusi RI (MKRI). (2024b). *Empat Menteri respons soal penyaluran bansos*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20201>.
- Knowledge Sector Initiative. (2020). *Penelitian cepat dorong kebijakan berbasis bukti*. <https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/2181-penelitian-cepat-dorong-kebijakan-berbasis-bukti>.
- Mawar, A. L., Gultom, A., dan Ketiar K. (2021). Dampak sosial ekonomi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ 08-UMUM-SH*, 1-12.
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. *Pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135220/permenkes-no-9-tahun-2020>.
- Portal Informasi Garuda. (2024). *Daftar Bansos Mei 2024*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8216/daftar-bansos-mei-2024?lang=1>.
- Prasetyo, Yanu E., Suncoko, R.A., Yulianti, R., Santoso, H., Andriani, D., Anik, M., dan Lestari, Dwi P. (2023). *Dilema bansos pembelajaran dari pandemi dan urgensi reformasi tata kelola*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim). (2020). *Kearifan lokal strategi tangani pandemi COVID-19 di Kota Magelang*. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kearifan-lokal-strategi-tangani-pandemi-covid-19-di-kota-magelang/>.
- Rahayu, Sri L. (2012). *Bantuan sosial di Indonesia sekarang dan ke depan: BOS, Jamkesmas, PNPM Mandiri, PKH*. Bandung: Fokus Media.
- Rukmorini, R. (2023). Sulit melepas kebiasaan menerima bantuan. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/28/sulit-melepas-kebiasaan-menerima-bantuan>.
- Sabarisman, M. (2020). *Ketepatan sasaran dan nilai kemanfaatan bantuan sosial sembako di Jabodetabek*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Singgih, V. (2024). Politisasi bansos dinilai kian massif jelang pilpres 2024 – ‘Bawaslu sudah memberikan himbauan kepada presiden’. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpw7enedn39o>.
- SMERU Research Institute. (2021). *Situasi kemiskinan selama pandemi*. <https://smeru.or.id/id/article-id/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>.
- Susantyo, B., Togiaratua, N., Sugiyanto, Habibulloh, Nyi R. I., Aulia, R., Johan, A.,

- Rudy, A. E., dan Bilal, A. (2020). *Bantuan sosial tunai Kementerian Sosial bagi keluarga terdampak COVID-19*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Winarno, E., Chatarina R., dan Fatwa N. H. (2020). *Persepsi masyarakat tentang kebijakan pengurangan risiko dampak COVID-19 bagi penerima manfaat bantuan sosial*. B2P3KS Press.